

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI KECAMATAN UJUNG PANDANG)

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CITY OF MAKASSAR (CASE STUDY IN UJUNG PANDANG DISCRIT)

Ridwan¹, Yosar Kardiati²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
Email: r1w4n55@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan Ekonomi daerah mutlak harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Wilayah Kota Makassar. Dengan demikian maka diharapkan akan terjadi pembukaan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi angka pengangguran. Kota Makassar adalah sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar peluang dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dengan judul “Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kota Makassar (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Pandang)”. Dimana rumusan masalahnya Bagaimana aparat perencanaan merancang pembangunan di Kota Makassar ? Bagaimana dampak dari hasil pembangunan di Kota Makassar sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar? Bagaimana Walikota Makassar melakukan pemaduan serasian antara kepentingan Pemerintah dengan masyarakat ? Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif?

Keyword: Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

Regional economic development is absolutely necessary to accelerate economic growth in order to catch up with the economic growth of the Makassar City Region. Thus, it is expected that there will be new job opportunities and reduce unemployment. Makassar City is the capital city of South Sulawesi Province. There are very big opportunities in order to take advantage of existing opportunities compared to other districts in South Sulawesi Province. This research is entitled “Regional Economic Development in Makassar City (Case Study in Ujung Pandang District)”. Where is the formulation of the problem. How does the planning apparatus design development in Makassar City? How is the impact of development results in Makassar City so that it can be enjoyed by the people of Makassar City? How does the Mayor of Makassar make a harmonious integration between the interests of the Government and the community? The research method used is a qualitative method?

Keyword: Economic Development

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Potensi masing-masing wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala

prioritas yang berbeda-beda untuk masing-masing wilayah. Dari sudut tingkat pendapatan, masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Wilayah dengan tingkat pendapatan rendah memiliki MPC (*marginal propensity to consume*) yang tinggi.

Hal ini bisa digunakan untuk meningkatkan efek pengganda (*multiplier effect*) dari pengeluaran pemerintah pusat.

Contoh manfaat mikro dapat dikemukakan sebagai berikut. IER membantu perencana wilayah dalam menentukan di bagian wilayah mana suatu kegiatan/proyek itu sebaiknya dibangun, tetapi tidak sampai menunjuk lokasi konkrit dari proyek tersebut. Dengan demikian mungkin ada yang mempertanyakan apa manfaat/kegunaan IER, karena tidak mampu langsung menunjuk lokasi. Seorang perencana wilayah berhadapan dengan wilayah yang begitu luas. Apabila langsung ingin mendapat jawaban dimana site-nya, ia harus melakukan survei terhadap keseluruhan wilayah. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. IER memiliki alat analisis yang bisa menunjuk pada bagian wilayah mana kegiatan seperti itu memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu disurvei secara rinci dipersempit untuk menghemat waktu dan biaya. Analisis IER membutuhkan biaya yang relatif murah karena dalam banyak hal cukup menggunakan data sekunder. Dengan demikian, IER dapat membantu perencanaan wilayah untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses memilih lokasi.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik serta peran sektor swasta-petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-organisasi sosial. Melalui perencanaan *pembangunan* ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economy entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang terkait satu sama lain (Arsyad, 1999:128).

Pengertian perencanaan secara luas seperti yang didefinisikan oleh Tjokroamidjajo (1992) adalah proses persiapan (*preparation*) secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, yaitu: (1) Merencanakan berarti memilih; (2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya; (3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan (4) Perencanaan untuk masa depan.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki pemanfaatan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya, sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Arsyad, 1999:127).

Perencanaan terpadu diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun dengan melibatkan unit-unit yang lebih kecil dan memperhatikan aspek-aspek bidang lainnya. Misalnya, perencanaan yang melibatkan semua sektor ekonomi sehingga hasilnya meliputi semua kegiatan sektor ekonomi, perencanaan yang mengikutkan peraturan lingkungan, dan perencanaan yang melibatkan beberapa daerah atau wilayah. Perencanaan terpadu mempunyai empat aspek, yaitu keterkaitan, kuantitas, optimisasi, dan resiko (Mangiri, 2000: 3).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh pemahaman bahwa pembangunan Ekonomi suatu daerah/wilayah sangat tergantung dari potensi daerah/wilayah masing-masing, juga aparat perencana yang didukung oleh masyarakatnya. Dengan demikian, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aparat perencana merancang pembangunan di Kota Makassar ?
2. Bagaimana dampak dari hasil pembangunan di Kota Makassar sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar?
3. Bagaimana Walikota Makassar melakukan pemadu serasian antara kepentingan Pemerintah dengan masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aparat perencana merancang pembangunan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak dari hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar
3. Untuk mengetahui seberapa jauh Walikota Makassar melakukan pemadu serasian antara kepentingan Pemerintah dengan masyarakat.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini merupakan gambaran bagaimana aparat perencana merancang pembangunan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar agar hasil pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Makassar.
3. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan informasi dalam pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan Pembangunan Ekonomi Regional pada khususnya. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi Regional.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Sebetulnya sangat sulit meletakkan posisi ilmu ekonomi regional (IER) dalam kaitannya dengan ilmu lain, terutama dengan ilmu bumi ekonomi (*economic geography*). Hal inilah yang menyebabkan banyak buku ilmu ekonomi regional tidak memberikan definisi tentang ilmu tersebut. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Ilmu bumi ekonomi mempelajari gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku umum. Prinsip-prinsip ini dapat dipakai dalam membuat kebijakan pengaturan penggunaan ruang wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan umum yang hendak dicapai.

Hal-hal yang dibahas dalam ilmu bumi ekonomi, antara lain mengenai teori lokasi. Dengan demikian perlu dipertanyakan apakah Ilmu Ekonomi Regional masih memiliki bidang yang dapat digarapnya yang berbeda dengan bidang yang telah digarap oleh ilmu lain. Jawabnya adalah, ya, ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan itu secara individual, yaitu mempelajari dampak satu atau sekelompok kegiatan disatu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi tersebut saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis

suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Baik ilmu bumi ekonomi maupun ilmu ekonomi wilayah mengenal dan mempergunakan beberapa istilah yang sama, misalnya wilayah nodal, wilayah homogen, kota dan wilayah belakangnya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Masalah yang pelik adalah bahwa para pemikir pertama tentang ekonomi dan lokasi seperti Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1954) dianggap sebagai pemberi landasan teori, baik bagi ilmu bumi ekonomi maupun bagi ilmu ekonomi regional. Walaupun begitu, keduanya masih bisa dibedakan, yaitu yang satu melihatnya dari segi kegiatan individual sedangkan yang lain melihatnya dari segi wilayah. Kalaupun ada perincian lebih lanjut hanya sebatas sektor (kumpulan kegiatan sejenis) dan bukan kegiatan individual. Unit analisis ekonomi regional adalah wilayah ataupun sektor dan bukan kegiatan individual.

Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi lain yang terakhir berkembang adalah ilmu ekonomi lingkungan sebagai pecahan dari ilmu ekonomi regional. Pemikiran kearah ekonomi regional secara sepotong-sepotong dicetuskan oleh Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1954). Namun secara umum Walter Isard adalah orang pertama yang dapat memberi wujud (landasan yang kompak) atas ilmu ekonomi regional. IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di Universitas Harvard yang berjudul *Location and Space Economics (1956)*. Penulis terdahulu hanya membicarakan bagian-bagian tertentu saja dan bersifat sepotong-sepotong serta tidak memberikan kerangka landasan yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan apakah

yang dibahas itu termasuk ekonomi regional atau tidak. Penulis terdahulu membicarakan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari IER tetapi pada saat itu dipandang dari sudut disiplin lain, misalnya ilmu bumi, perencanaan perkotaan, tata guna tanah, dan lainnya. Walter Isard adalah orang yang pertama memberi kerangka landasan tentang apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam *regional science*, yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Ahli ekonomi menganggap hasil karya Walter Isard masuk kategori ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional baru masuk ke Indonesia pada awal tahun 1970-an, karena pemerintah menyadari pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Artinya pemerintah mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidaklah boleh dibuat seragam untuk semua daerah, padahal kondisi dan potensi daerah itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Perlu dicatat bahwa didalam buku ini akan sering dipertukarkan antara penggunaan istilah wilayah atau daerah. Secara singkat dijelaskan bahwa istilah wilayah akan digunakan untuk pengertian ruang secara umum sedangkan istilah daerah digunakan ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintahan. Istilah kawasan akan digunakan untuk wilayah yang memiliki kesamaan kondisi fisik. Misalnya apabila digunakan istilah perekonomian wilayah, uraian itu menyangkut perekonomian suatu kesatuan ruang tanpa ada konotasi dengan wilayah pemerintahan tertentu. Adapun apabila digunakan istilah perekonomian daerah, hal itu terkait dengan wilayah administrasi pemerintahan, misalnya perekonomian wilayah provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan. Istilah *region* dalam bahasa inggris umumnya.

Tujuan Ekonomi Regional

Tujuan (*goals*) ilmu ekonomi regional sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya.

Ferguson (1965) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah (1) *full employment*, (2) *economic growth* (3) *price stability*.

Uraian di atas masing-masing tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menciptakan *full employment* atau setidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.
2. Adanya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi), karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.
3. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat was-was, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai riil atau manfaat berkurang dikemudian hari.

Ada di antara tujuan ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (pemerintah daerah) apabila daerah bekerja sendiri, yaitu menstabilkan tingkat harga. Namun apabila daerah itu dapat memenuhi tujuan pertama dan kedua, hal itu turut membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketiga. Namun disisi lain, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit, dapat membuat kebijakan yang lebih bersifat *spasial* sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih

baik ketimbang oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di daerah secara lebih baik, yang merupakan tujuan pokok tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
2. Pemerataan pembangunan dalam wilayah
3. Penetapan sektor unggulan wilayah
4. Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan.
5. Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

Pengertian Ekonomi Regional

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Sebetulnya sangat sulit meletakkan posisi ilmu ekonomi regional (IER) dalam kaitannya dengan ilmu lain, terutama dengan ilmu bumi ekonomi (*economic geography*). Hal inilah yang menyebabkan banyak buku ilmu ekonomi regional tidak memberikan definisi tentang ilmu tersebut. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Ilmu bumi ekonomi mempelajari gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku umum. Prinsip-prinsip ini dapat dipakai dalam membuat kebijakan pengaturan penggunaan ruang wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan umum yang hendak dicapai.

Hal-hal yang dibahas dalam ilmu bumi ekonomi, antara lain mengenai teori lokasi. Dengan demikian perlu dipertanyakan apakah Ilmu Ekonomi Regional masih memiliki

bidang yang dapat digarapnya yang berbeda dengan bidang yang telah digarap oleh ilmu lain. Jawabnya adalah, ya, ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan itu secara individual, yaitu mempelajari dampak satu atau sekelompok kegiatan disatu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi tersebut saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Baik ilmu bumi ekonomi maupun ilmu ekonomi maupun ilmu ekonomi wilayah mengenal dan mempergunakan beberapa istilah yang sama, misalnya wilayah nodal, wilayah homogen, kota dan wilayah belakangnya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Masalah yang pelik adalah bahwa para pemikir pertama tentang ekonomi dan lokasi seperti Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1954) dianggap sebagai pemberi landasan teori, baik bagi ilmu bumi ekonomi maupun bagi ilmu ekonomi regional. Walaupun begitu, keduanya masih bisa dibedakan, yaitu yang satu melihatnya dari segi kegiatan individual sedangkan yang lain melihatnya dari segi wilayah. Kalaupun ada perincian lebih lanjut hanya sebatas sektor (kumpulan kegiatan sejenis) dan bukan kegiatan individual. Unit analisis ekonomi regional adalah wilayah ataupun sektor dan bukan kegiatan individual.

Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi lain yang terakhir berkembang adalah ilmu ekonomi lingkungan sebagai pecahan dari ilmu ekonomi regional. Pemikiran kearah ekonomi regional secara sepotong-sepotong dicetuskan oleh Von Thunen

(1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1954). Namun secara umum Walter Isard adalah orang pertama yang dapat memberi wujud (landasan yang kompak) atas ilmu ekonomi regional. IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di Universitas Harvard yang berjudul *Location and Space Economics* (1956). Penulis terdahulu hanya membicarakan bagian-bagian tertentu saja dan bersifat sepotong-sepotong serta tidak memberikan kerangka landasan yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan apakah yang dibahas itu termasuk ekonomi regional atau tidak. Penulis terdahulu membicarakan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari IER tetapi pada saat itu dipandang dari sudut disiplin lain, misalnya ilmu bumi, perencanaan perkotaan, tata guna tanah, dan lainnya. Walter Isard adalah orang yang pertama memberi kerangka landasan tentang apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam *regional science*, yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Ahli ekonomi menganggap hasil karya Walter Isard masuk kategori ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional baru masuk ke Indonesia pada awal tahun 1970-an, karena pemerintah menyadari pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Artinya pemerintah mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidaklah boleh dibuat seragam untuk semua daerah, padahal kondisi dan potensi daerah itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Perlu dicatat bahwa didalam buku ini akan sering dipertukarkan antara penggunaan istilah wilayah atau daerah. Secara singkat dijelaskan bahwa istilah wilayah akan digunakan untuk pengertian ruang secara umum sedangkan istilah daerah digunakan ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintahan. Istilah kawasan akan digunakan untuk wilayah yang memiliki kesamaan kondisi fisik. Misalnya

apabila digunakan istilah perekonomian wilayah, uraian itu menyangkut perekonomian suatu kesatuan ruang tanpa ada konotasi dengan wilayah pemerintahan tertentu. Adapun apabila digunakan istilah perekonomian daerah, hal itu terkait dengan wilayah administrasi pemerintahan, misalnya perekonomian wilayah provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Istilah *region* dalam bahasa Inggris umumnya diterjemahkan dengan wilayah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian

Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian *kualitatif*. Menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 1998:3) dinyatakan bahwa "penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan". Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian-penyesuaian dengan kenyataan

yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Sedangkan menurut Alston (1998), "*Qualitative researchers are more interested in understanding how others experience life, in interpreting meaning and social phenomena, and in exploring new concepts and developing new theories*". (Peneliti kualitatif lebih tertarik untuk memahami tentang pengalaman hidup dari orang-orang, dalam menginterpretasikan arti dan fenomena sosial, serta dalam mendalami konsep-konsep baru dan membuat teori baru).

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai profesionalisme di Kecamatan termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Hal ini berdasarkan tujuan penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3). Sedangkan menurut Nawawi dan Martini (1992:211) mengemukakan bahwa ciri dari salah satu penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dimana data yang ditampilkan

Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan "*purposive sampling*" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000: 128).

Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan instansi yang terkait dengan aparat pemerintah Kota Makassar maka dipergunakan teknik *snowball sampling*. penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan di akhiri.

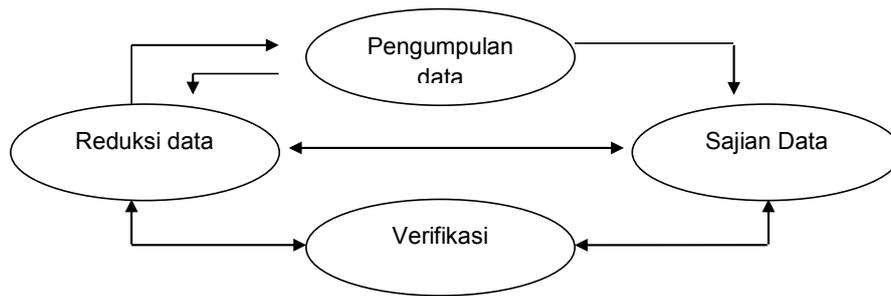
2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya

3. Observasi (pengamatan lapangan)

Yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada lapangan. Proses pengolahan data bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasakan masih kurang mantap, maka dilakukan penggalian data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian.

Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992:20) dengan model interaktif sebagai berikut:



Penjelasan:

1. Reduksi data, sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis terhadap data penelitian ini mengacu pada metode Van Eckartsberg (dalam Moustakas, 1994:15) yang menggambarkan langkah-langkah dalam kajian fenomenologis sebagai berikut:

1. *The problem and question formulation the phenomenon*

Dalam tahapan ini, penulis berusaha menggambarkan fokus penelitiannya dengan memformulasikan atau merumuskan pertanyaan dalam suatu cara tertentu yang dapat dimengerti oleh orang lain. Secara operasional, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana subyek memberikan penjelasan pengalamannya tentang profesionalitas aparatur pemerintah.

2. *The data generating situation – the protocol life text*

Tahapan kedua yang harus dilakukan oleh penulis adalah membuat narasi yang bersifat deskriptif berdasarkan hasil dialognya dengan subyek yang dalam penelitian fenomenologis lazim dikenal dengan “*co – researcher*”. Dalam konteks ini narasi yang dibuat bersumber dari hasil wawancara dengan subyek yang menceritakan tentang fenomena profesionalitas di lokasi penelitian.

3. *The data analysis – explication and interpretation*

Tahapan selanjutnya, setelah data terkumpul (berdasarkan dialog dengan subyek), maka yang dilakukan oleh penulis adalah membaca dan meneliti dengan cermat data tersebut guna mengungkap konfigurasi atau susunan makna yang mencakup baik struktur maupun bagaimana makna yang diciptakan. Mengarah pada konteks penelitian

ini, adalah mengungkap profesionalitas aparaturnya pemerintah di lokasi penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu Kota yang ada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formal didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah Kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD TK.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati

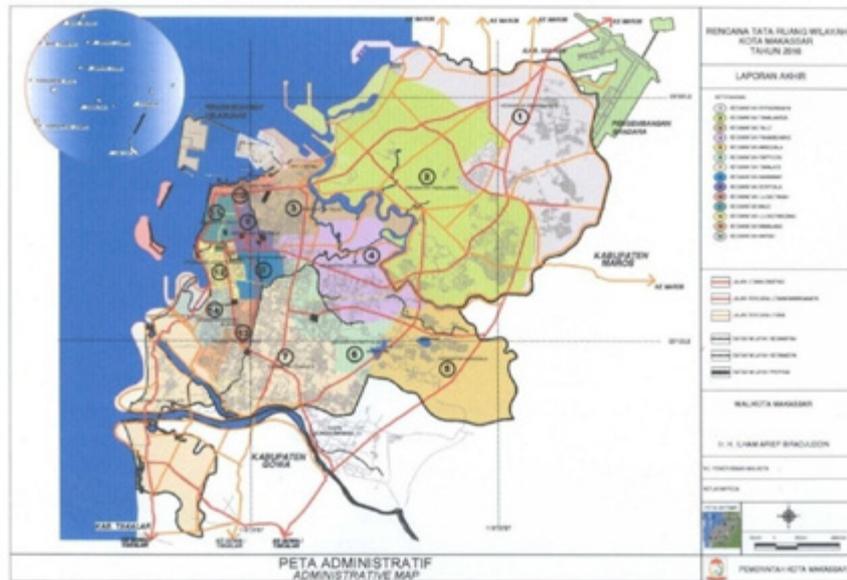
hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 November 1597.

Kota Makassar, yang kadang dieja Macassar atau Mangkasara; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang adalah Kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Secara Geografis wilayah Kota Makassar berada pada koordinat 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Dengan batas wilayah:

Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajene
Selatan : Kabupaten Bone
Barat : Selat Makassar
Timur : Kabupaten Maros

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,77 km² dengan penduduk 1.668.314, sehingga Kota Makassar sudah dapat dikategorikan menjadi Kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar



Sumber: Website Kota Makassar-Peta Adminis-trasi Kota Makassar

TABEL 4.3
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Ket
1	Baru	0,21	
2	Bulogading	0,23	
3	Lae-Lae	0,22	
4	Mangkura	0,37	
5	Sawergading	0,41	
6	Maloku	0,20	
7	Losari	0,27	
8	Pisang Selatan	0,18	
9	Lajangiru	0,20	
10	Pisang Utara	0,34	
Jumlah (Km ²)		2.63	

Sumber: Data Base Kecamatan Ujung Pandang 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kecamatan Ujungpandang ialah 2,63 Km². Selanjutnya untuk mengetahui

jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang ada dimasing-masing kelurahan diKecamatan Ujung Pandang lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 4.8
Jumlah Warga Miskin Kecamatan Ujung Pandang

No	Kelurahan	Jumlah	Ket
1	Baru	15	
2	Bulogading	239	
3	Lae-Lae	690	
4	Mangkura	21	
5	Sawergading	62	
6	Maloku	86	
7	Losari	42	
8	Pisang Selatan	258	
9	Lajangiru	275	
10	Pisang Utara	268	
Jumlah Warga Miskin		1947	

Sumber: Data Base Kecamatan Ujung Pandang 2019

Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Melalui konsep Badan Pusat Statistik, usia kerja dapat digolongkan menjadi dua yakni usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomi berpotensi menghasilkan out-put barang dan jasa, juga mencakup mereka yang tidak bekerja tetapi bersedia bekerja serta berada pada level umur 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk bukan usia kerja di kecamatan Ujung Pandang yaitu 13.806 jiwa, yang terdiri dari 7.032 jiwa laki-laki dan 6.774 jiwa perempuan. Untuk penduduk yang termasuk usia kerja pada kecamatan ini mencapai 42.988 jiwa. Jumlah penduduk perempuan usia kerja lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu 21.934 jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki usia kerja berjumlah 21.054 jiwa.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang sebagai salah satu SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Makassar memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, serta Ketentraman dan Ketertiban.

- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Kelurahan dan Pelayanan Administrasi Publik.
- c. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu Kecamatan Ujung Pandang menetapkan Visi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah *“Terwujudnya Pelayanan Umum Pemerintahan yang Aman dan Responsif”*.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka *Misi Kecamatan Ujung Pandang adalah:*

1. Meningkatkan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama;
5. Melaksanakan penataan lingkungan di semua lorong;
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan;

Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujung Pandang

Adapun capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Ujung Pandang dapat dilihat pada tabel 2.10. Berdasarkan tabel 2.10 dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah memenuhi capaian target yang telah ditentukan sesuai dengan target renstra 2015-2019. Namun dari

5 indikator masih terdapat satu indicator yang belum mencapai target yaitu ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan pemerintah.

Tidak tercapainya target pada program ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan pemerintah disebabkan karena semakin meningkatnya kriminalitas dan semakin berkembangnya tindak kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Pandang, oleh sebab itu sangat diharapkan semakin meningkatnya koordinasi antara pihak yang berwenang dengan pemerintah. Selain semakin meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi, penegakan Peraturan daerah juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya program ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan pemerintah serta kurangnya personil keamanan yang dimiliki kecamatan.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pelayanan yang optimal merupakan tujuan utama, namun di dalam pelaksanaannya

ada beberapa faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan prima di kantor Kecamatan Ujung Pandang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitaskegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lorong Garden

Pada kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lorong Garden, penulis menggunakan berbagai landasan teori-teori yang berasal dari beberapa buah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan fenomena yang penulis hadapi saat melakukan magang/ penelitian yang berjudul Melalui Program Lorong Garden (LONGGAR) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Untuk menanggapi lebih jauh mengenai fenomena yang diteliti tersebut maka perlu ditinjau dengan menggunakan konsep tentang pemberdayaan masyarakat.

DATA LORONG GARDEN KECAMATAN UJUNG PANDANG									
NO	KELURAHAN	ALAMAT	R/W / RT	JUMLAH KK	JUMLAH BANGUNAN	LEBAR (m)	PANJANG (m)	JENIS USAHA	KETERANGAN
1	BARU	JL. AMANAGAPPA LR.1	001002	2	2	3	20	USAHA CEKER AYAM & BAHAN CAMPURAN	
		JL. AMANAGAPPA LR.2	001001	21	20	3	100	WARUNG KULINER SBP SAJI & TEMPAT KOST	
		JL. AMANAGAPPA LR.3	001001	10	6	2,5	29	RJAL BARANG CAMPURAN & KOST	
		JL. AMANAGAPPA LR.4	001002	21	15	2,5	30	RJAL BARANG CAMPURAN & KOST	
		JL. INCE NURDIN JL. SAMUN LR.1	001001 003003	1 2	1 2	2 3	06 20	-	
	JL. BALAKOTA LR.1	002002	16	5	PLAT 4 LANTAI (ASPOL)	3	33	USAHA MUREL & MAKANAN JADI	
2	BULOGADANG	JL. SOBBA OPU LR.277	001002	30	25	4,5	90	KULINER	
		JL. WR SUPRATMAN LR.177	004001	45	24	1,5	200	KOST, KULINER, POSYANDU DAN WARUNG SEMBAKO	
		JL. BAU MASSEPE LR.273	003002	12	6	2	60	BANK SAMPAH DAN KULINER	
		JL. SOBBA OPU LR.275	002003	21	11	5	50	REPARASI KURSI DAN PEDAGANG TELUR	
3	LAL-LAL	LORONG MENDI	002001	2	2	1,15	15	-	
		LORONG UNGU	001001	5	5	2	20	-	
		LORONG RT 001	003001	42	42	2	100	-	
		LORONG KB	001002	23	19	2	32	-	
4	MANGKERA	JL. SYARIF AL-QADRI	001003	31	-	2,5	97	KERAJINAN TANGAN REPARASI KURSI, KOST	
		JL. SYARIF AL-QADRI LR.27	001002	59	-	2,5	97	KATERING, KOST	
5	SAWERIGADANG	JL. SUNGAI SADDANG LR.1	001002	17	14	2	100	KULINER NASI KUCING, BARANG CAMPURAN, BURSA CAKAR	
		JL. SAWERIGADANG	002002	15	10	3	120	BARANG CAMPURAN, WARNET, KUE-KUE	
		JL. CHARE ANWAR LR.1	003004	25	17	2,5	120	BARANG CAMPURAN, RENTAN MOBIL	
6	MALOKU	JL. S OPU LR.250	002001	23	18	4	140	UKM PEMBUATAN KUE TRADISIONAL, MAKANAN KHAS MAKASSAR	
		JL. S OPU LR.251	002003	50	40	2	60	-	
		JL. S OPU LR.252 A	001001	17	15	1,5	40	-	
		JL. S OPU LR.253 A	001001	13	7	3	40	-	
		JL. RANGGONG LR.252	001002	20	10	3	70	-	
		JL. SOBBA OPU LR.252	001002	20	20	3	50	OLEH-OLEH MAKASSAR, UKM PEMBUATAN KUE TRADISIONAL	
		JL. SOBBA OPU LR.254	001001	20	12	2	40	-	
JL. K.H ACHMAD DAHLANI JL. ALI MALAKA LR.258	003003 002002	21 13	11 12	1,4 1,5	50 20	UKM MENJAJET			
7	LOKARI	JL. DATUM SING LR.351	1	53	62	2	300	KOST, BI ULANG AIR MINERAL & PERDAGANGAN	
8	PISANG SELATAN	JL. G. MERAPI 16 (RUNTU)	002001	7	15	1	30	-	
		JL. G. NONA LR.56 HEGGER	002002	30	23	5	150	KULINER, BANK SAMPAH MARE	
		JL. G. NONA LR.13	002004	18	18	1	120	UKM PEMBATIK LONTARA	
		JL. G. MERAPI LR.179	002001	11	8	1	35	-	
		JL. S LIMBOTO LR.56	002002	16	16	5	120	KULINER MAKANAN SBP SAJI, TANAMAN PERBANTIAN, TOGA	
		JL. G. NONA LR. BULU INA	003001	26	20	4	150	-	
		JL. S LIMBOTO LR.52 A	003004	18	16	4	100	KULINER, TAMAN LORONG, BANK SAMPAH TOGA	
		JL. G. MERAPI LR.174	001003	8	7	2,5	30	KULINER, WARUNG JEDUP	
		JL. G. MERAPI LR.92	001003	40	35	2	100	KULINER, BANK SAMPAH ALU, KEBUN TANIKULUARGA	
		JL. G. NONA LR.56 CENGKEH	002001	23	16	4	100	KULINER, PASAR, TAMAN LORONG, TOGA	
9	LAJANGIRU	JL. G. MERAPI LR.57	002002	40	35	2,5	95	PENGRAJIN BATU CINCIN	
		JL. S LIMBOTO LR.53	003004	48	40	3	100	KULINER BEBER, DANGKOT	
		JL. S LIMBOTO LR.54	003002	60	56	3	70	WARUNG BAHAN CAMPURAN	
		JL. S LIMBOTO LR.55	003001	65	60	3	100	USAHA SERVICE AC	
10	PISANG UTARA	JL. TINGGI MAE LR.1	004001	60	56	3	55	PEDAGANG, TEMPAT KOST	
		JL. TINGGI MAE LR.2	004002	58	53	3	60	PEDAGANG ASONGAN	
		JL. S. CELENDU LR.07	1	56	52	3	125	PEDAGANG BAKSO	

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan data-data dan informasi yang saya peroleh selama melakukan penelitian di Kota Makassar dimana saya memilih secara acak sebagai sampel salah satu Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Ujung Pandang. Dimana dari hasil perolehan data dan informasi yang saya dapat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aparat perencana telah melakukan perencanaan yang terintegrasi antara level Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Makassar. Dimana aparat perencana tingkat Kota Makassar sering mengadakan rapat koordinasi dengan perencana tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar. Karena koordinasinya berlangsung dengan baik maka Walikota sebagai penanggung pembangunan di Kota Makassar dapat mengambil kebijakan dengan tepat disebabkan masyarakat dilibatkan dalam mendesain perencanaan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Masyarakat yang membuat perencanaan, masyarakat yang melaksanakan, masyarakat yang mengawasi sekaligus masyarakat juga yang memanfaatkan dan menikmatinya.
2. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya desain perencanaan yang baik sungguh sangat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Kota Makassar.
3. Walikota Makassar dalam mendesain perencanaan menganut sistem perencanaan yang bottom up planning dimana masyarakat dilibatkan secara penuh untuk menentukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini Walikota Makassar juga memberikan keleluasaan pada kepala-kepala OPD

untuk mendesaian perencanaan sesuai dengan kebutuhannya walaupun tetap dikoordinasikan dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Kota Makassar.

Saran

1. Pihak perencana tetap selalu melakukan koordinasi mulai tingkatan Kelurahan, Kecamatan sampai pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Makassar sehingga sinergitas dapat terwujud ujung-ujungnya dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar.
2. Kedepan aparat perencana dapat meningkatkan lagi koordinasi sehingga memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Kota Makassar.
3. Dalam pengambilan keputusan dalam hal perencanaan Walikota Makassar dapat meningkatkan lagi turun ke Kelurahan-kelurahan sehingga dapat menyerap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Yogyakarta
- Analisis Pembangunan Manusia Kota Makassar, Tahun 2017.
- Ancok, Djamaluddin, 1999, *Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis*, (makalah)
- Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Tahun 2018.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995, *Organizations*, Richard. D. Irwin. Inc
- Kartono, Kartini, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Grafindo, Jakarta
- Mintzberg, Henry, 1983, *Structure In Five: Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall

- Milles, B Matthew, Michael Huberman, 1992
*:Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press,
Jakarta
- Modul Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kota Makassar, Tahun 2017.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian
Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
Potret Kota Makassar, Tahun 2018
- Ridwan, Pembangunan Ekonomi Regional,
2016, Pustaka Puitika Yogyakarta..
- Siagian, Sondang P, 1994, *Patologi Birokrasi*,
Galia Indonesia, Jakarta
- Simamora, Henry, *Manajemen Sumber Daya
Manusia*, STIE TKPN, Yogyakarta, 1995
- Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, *Pembangunan,
Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta